



PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN KELAS 1A KHUSUS

JL. Ampera Raya NO. 133 Ragunan Jakarta Selatan
Tel. 62.21.7805909. Fax. 62.21.7805906

Email : informasi@pn-jakartaselatan.go.id delegasipnjs@yahoo.com
Website : pn-jakartaselatan.go.id

PENGUMUMAN

Nomor: W10.U3/12/KP.01.5/1/2017

DIBERITAHUKAN KEPADA SELURUH HAKIM DAN PEJABAT STRUKTURAL/
FUNGSIONAL SERTA PARA PEGAWAI DAN HONORER PENGADILAN NEGERI
JAKARTA SELATAN UNTUK HADIR DALAM ACARA RAPAT EVALUASI BULANAN
YANG AKAN DILAKSANAKAN PADA:

HARI : SELASA
TANGGAL : 4 JANUARI 2017
JAM : 08.30 WIB
TEMPAT : RUANG SIDANG UTAMA
(PROF. H. OEMAR SENO ADJI, SH)

ATAS PERHATIANNYA KAMI UCAPKAN TERIMA KASIH

JAKARTA, 2 JANUARI 2017

SEKRETARIS



H. AHMAD HAKIR, SH., MH

**NOTULEN RAPAT BULANAN
TANGGAL 4 JANUARI 2017
PENGADILAN NEGERI JAKARTA SELATAN**

Pimpinan Rapat : Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Sekretaris Rapat : Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
Notulis : Astrid Hastridian, SH., MH

Agenda Rapat :

1. Pengarahan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai SIPP, Renovasi Loket Pelayanan, Website Pengadilan, Pengelolaan Tilang, Delegasi dan pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan tupoksi dan SOP dan kode etik Hakim, kode etik Panitera dan Jurusita, serta kode etik Pegawai Mahkamah Agung RI.
2. Pengarahan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengenai Baperjakat, Kebersihan Kantor, dan Akreditasi.
3. Evaluasi atas permasalahan yang diperiksa pada rapat sebelumnya.
4. Pengarahan Sekretaris mengenai Akreditasi, Maklumat Pelayanan dan Kunjungan BPK.
5. Tanya jawab.

Isi Notulen Rapat Bulanan :

Pada hari ini Rabu, tanggal 7 September 2016 di Ruang Sidang Utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dilakukan Rapat Bulanan yang dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri yang dihadiri oleh Wakil Ketua, Para Hakim, Sekretaris dan Pejabat Struktural Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagaimana daftar hadir terlampir.

Rapat evaluasi pada hari ini dimulai dengan himbauan dari Ketua Pengadilan Jakarta Selatan:

- Kode Etik Hakim harus selalu ditaati dan tidak boleh melanggar kode etik yang telah ditentukan.
- Persentase SIPP Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada saat ini adalah 68,78%. Pada saat ini posisi SIPP PN Jakarta Selatan masih tertinggi di wilayah PT Jakarta, namun kita jangan sampai lengah dan masih harus melakukan peningkatan SIPP kita lagi karena Pengadilan lain di Jakarta akan menyusul persentase SIPP kita.
- Dalam rangka perbaikan untuk memberikan pelayanan terbaik untuk pencari keadilan, kita melakukan perbaikan. Ruang Mediasi akan dipindahkan ke bawah. Loket Perdata dan Pidana diluar. Akan dilakukan steril sehingga tidak ada pencari keadilan yang masuk ke dalam. Akses masuk akan menggunakan kartu. Untuk parkir motor akan ditempatkan di depan di dinding yang berbatasan dengan Indomart. Karena keterbatasan tempat akan dibuatkan 2 (dua) jalur. Taman sudah dipagar untuk keamanan semua pihak.
- Penambahan Admin SIPP (Hakim Pengawas Bidang IT, Sohe, SH., MH)
 1. Sesuai dengan Tupoksi (Surat Edaran Dirjen Badilum No. 353 Tahun 2015), masih banyak yang belum kita lakukan dan ada sekitar 200-an template yang belum ada.
 2. Secara berjenjang pengerjaan SIPP dimulai dari Admin kemudian ke Ketua Pengadilan, kemudian dari KPN kepada Hakim. Setelah itu Hakim kepada Panitera Pengganti.

3. Untuk Admin SIPP Perdata dan Pidana masing-masing dikerjakan oleh staf dari Kepaniteraan Perdata dan Pidana.
 4. Sesuai dengan ISO masih banyak data yang belum masuk ke dalam SIPP. Kita harus bekerjasama dan saling mengingatkan dan sama-sama bekerja dalam pelaksanaan SIPP. SIPP harus selalu dicek.
 5. SMS di SIPP belum diaktifkan, padahal sms ini berfungsi sebagai peringatan dari KPN kepada anak buahnya. WA hanya sebagai pendukung.
 6. Perkara-perkara lama yang Hakimnya sudah pindah, sudah dibentuk Tim Kecil untuk menyelesaikan SIPP yang masih menjadi tunggakan.
- Website Pengadilan Negeri Jakarta Selatan harus selalu diupdate
 1. Status perkara harus berubah dan data yang ada tidak update, masih banyak foto-foto Hakim yang sudah pindah terpampang didalamnya, sedangkan Hakim yang baru belum ada fotonya. Panmud Hukum harus menunjuk seorang admin yang khusus mengelola website.
 2. Penanganan perkara tilang harus mulai diupdate dalam website.
 - Delegasi dalam SIPP harus mulai diisi. E-mail dan faks sudah dianggap sah. Apabila tidak dilaksanakan akan ditembuskan ke Ketua Pengadilan Tinggi.
 - IT dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kemudahan informasi masyarakat. Dengan dibantu secara maksimal oleh Tim IT, diharapkan para Hakim, PP dan Jurusita dapat melaksanakan sendiri pekerjaan dan kewajibannya masing-masing, jangan dibebankan ke IT lagi. Apabila masih belum bisa menjalankan SIPP, bisa belajar atau bertanya kepada Tim IT.
 - Di dalam SIPP ada template Berita Acara, yang apabila diisi secara rutin dan benar akan memudahkan pekerjaan PP dalam pengerjaan BA Persidangan.
 - Untuk pengerjaan Direktori Putusan, Wapan diharapkan untuk mengumpulkan para PP dengan didampingi Tim IT dan Hakim yang menguasai IT, untuk belajar bersama. Dibuat sesi tersendiri. Jangan pernah berhenti untuk belajar, demi kemajuan kita bersama dan kita dapat mengurangi beban Tim IT.
 - Untuk informasi, satgas Bawas MARI akan diturunkan untuk mengawasi pelaksanaan penanganan tilang.
 - Di belakang dekat mesjid masih banyak ditemukan puntung rokok, bekas tissue dan sampah lainnya yang dibuang sembarang. Apabila ada orang lain yang membuang kita harus mengingatkan untuk dibuang pada tempatnya. Kita harus selalu menjaga kebersihan.
 - Setiap hari Jumat diadakan olahraga, namun terkadang Pimpinan tidak bisa mengikutinya dikarenakan ada undangan atau acara, namun tetap berolahraga apabila ada kesempatan. Kita harus berolah raga selain untuk kesehatan juga untuk meningkatkan kinerja kita.
 - Baperjakat untuk mengisi kekosongan Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Ortala harus segera dilaksanakan, agar jangan terlalu lama jabatan tersebut tidak terisi. Pendaftaran terakhir sebelum Baperjakat dilaksanakan.
 - WA group dan SMS dalam SIPP harus dimanfaatkan.

- Tata persuratan harus sesuai dengan ketentuan yang ada.
- Apabila ada Majelis Hakim yang dilaporkan karena semata-mata adanya ketidakpuasan dari pihak yang berperkara dan dimintakan untuk diganti, kami unsur Pimpinan akan memback up dan kami tidak akan mengganti Majelis Hakim begitu saja. Pergantian Majelis dilakukan dalam Majelis yang sama kecuali ada alasan lain yang bisa diterima. Panitia Pengganti tidak boleh mengubah penetapan Majelis Hakim sendiri harus sejalin dari Pimpinan.
- Denda tilang yang dijatuhkan harus dimasukkan dalam SIPP. Panmud Pidana mempunyai tanggung jawab yang besar terutama tilang. Mahkamah Agung menghendaki sidang hari ini, jam 10 sudah ditayangkan dalam website, seperti PN Yogyakarta. Akan ditunjuk 5 sampai dengan 6 orang Hakim untuk menyidangkan tilang. Apabila kekurangan staf akan diperbantukan staf lain. Pada saat ini sedang dilakukan penelitian penanganan tilang oleh Puslitbang MARI bersama-sama dengan PSHK yang tergabung dalam Tim Pokja yang diketuai oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial.
- Berdasarkan hasil survey yang menjadi hambatan dan masalah adalah disaat Mahkamah Agung sedang membangun citra dan wibawa MA dan institusi dibawahnya, namun tercoreng karena ulah dari para calo tilang. Pada saat ini sedang disusun rancangan Perma mengenai tilang yang terdiri dari 18 pasal.
- Untuk pelaksanaan tilang apabila pelanggar tilang tidak keberatan disarankan langsung ke Kejaksaan dan membayar denda di bank. Namun apabila pelanggar keberatan baru disidangkan.
- Pada hari kemarin diadakan rapat dengan Dirjen Badilum, hal tersebut dikarenakan adanya kejadian sehubungan dengan pelaksanaan tilang di PN Cibinong. PN Cibinong masuk ke dalam pemberitaan. Panmud Pidananya akan dicopot. Untuk percontohan tilang dapat kita melihat penanganan tilang di PN Yogyakarta yang menerima akreditasi dengan nilai A Excellent.
- Akan diadakan pertemuan dengan Para Hakim untuk mempercepat proses sidang tilang, akan diambil kesepakatan mengenai denda pelanggaran SIM, STNK, marka jalan, pelanggaran berat atau ringan.
- Bapak Dirjen menantang peserta rapat untuk mendecclare di website berapa lama waktu untuk menyelesaikan sidang tilang. Diharapkan sidang tilang dapat dilakukan dalam waktu 1 jam. Intinya kecepatan, perlahan calo tilang akan hilang. Pengelolaan tilang harus kita benahi.
- Kepala Bawas, Pak Nugroho dahulu sempat menjadi Hakim Pengawas Tilang di PN Jakarta Selatan. Beliau mengatakan bahwa dahulu banyak berkas tilang dari Polisi yang sudah ditemplei uang, barang bukti sudah tidak ada. Kepolisian meminta kita untuk menyidangkannya. Kedepannya sudah tidak boleh ada lagi yang seperti itu.
- Pelaksanaan sidang tilang 1 jam, setelah itu diputus verstek, denda kemudian ditampilkan di website, dan dendanya langsung dibayarkan di bank.
- Akan dibentuk Satgas Anti Penyimpangan, yang ditunjuk orang-orang yang kredibel. Satgas ini akan bekerja dibawah Wakil Ketua.
- Intern tidak boleh lagi bermain dalam tilang. Hakim-hakim tidak menerima uang yang berhubungan dengan tilang.
- Sesuai dengan Perma No. 8, pimpinan, Hakim Pengawas Bidang, Panmud atau Kasub yang anak buahnya bermain akan terkena sanksi. Harus selalu dilakukan pengawasan melekat (Waskat).

- Tabel tilang dipasang dipengumuman selain diwebsite, yang bisa dilihat oleh masyarakat luas.
- Tidak menerima titipan uang dan harus diproses cepat.
- Ruang sidang dimaksimalkan.
- Akan dilakukan rapat untuk membahas declare proses tilang yang dapat dilakukan dalam waktu tertentu.
- Akan dikerahkan Hakim sebanyak mungkin.
- Bawas akan melakukan shock therapy, akan dicari korban/ pelaku yang bermain-main dalam masalah tilang, untuk kemudian ditangkap dan dipecat. Panmud bisa dicopot jabatannya karena masalah tilang.
- Akan segera dilaksanakan rapat TPM PP. Untuk PP dan Jurusita yang sudah tidak dapat dibina lagi, Dirjen Badilum menyarankan untuk diusulkan untuk dimutasi. Namun KPN berjanji tidak akan melakukan pengusulan tersebut, karena semua dianggap baik dan yang kurang baik sudah menjadi lebih baik. Kita bekerja sesuai Tupoksi kita masing-masing, maka akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Bekerja sesuai dengan rel/ jalurnya. Saling mengingatkan agar kita terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
- Hakim Pengawas membuat laporan. Dibuatkan laporan Hakim Pengawas Bidang dalam suatu Berita Acara Pengawasan yang ditandatangani oleh Hakim Pengawas Bidang bersama-sama dengan Panmud atau Kasub yang diperiksa. Bulan September ini harus segera dibuat. Laporan hakim pengawas bidang harus dibuat 3 bulan sekali.
- Delegasi harus dijalankan dahulu, baru dimintakan biayanya. Jurusita atau Jurusita Pengganti yang meminta bantuan delegasi dan tidak dijalankan, laporkan pada atasan baik itu kepada Wapan, Paniteta, WKPN dan kepada Ketua. Untuk selanjutnya diteruskan kepada KPN yang dimintakan bantuan delegasinya. Sebelum sidang Hakim harus mengecek relaas panggilannya apakah sudah ada kejelasan atau belum.
- Diharapkan kedisiplinan kita semua.

Rapat evaluasi selanjutnya dilanjutkan dengan himbauan dari Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

- Mari kita bekerja dengan hati, kita melaksanakan apa yang dikatakan oleh Bapak KPN untuk kebaikan kita semua.
- Untuk pelaksanaan Tilang, mengapa orang luar masuk, karena kita membuka pintu. Mari kita bersama-sama untuk berbenah.
- Tidak boleh lagi ada uang dilaci-laci (mulai Jumat ini). Tilang harus dibayar dibank.
- Orang lain diperbolehkan mengambil tilang dengan menggunakan surat kuasa.
- Mari kita bersama-sama untuk berbenah diri. Jangan sampai ada korban di PN Jakarta Selatan dalam Operasi Tim Bawas. Kita akan selamat apabila kita sudah berjalan sesuai track/ aturan-aturan yang ada.
- Kebersihan sudah lebih baik, tinggal pengelolaannya. Pada saat ini petugas taman yang mengerjakan petugas kebun, main babat pohon.
- Mari kita berbenah diri, agar kita bisa segera diakreditasi.

Tambahan dari KPN :

- Untuk saat ini di wilayah hukum PT Jakarta, PN Jakarta Barat yang ditunjuk untuk diakreditasi. Dengan alasan gedung sudah bagus/ permanen. PN Jakarta Pusat sudah menawarkan untuk diakreditasi juga.

- Kita memiliki Pak Sekretaris yang merupakan Tim Penilai Pusat Akreditasi. Kita mulai untuk membenahi diri, sehingga kita bisa menawarkan diri untuk dilakukan akreditasi. Penilaian standar berdasarkan kinerja, keadaan kantor dan sebagainya (8 area perubahan).

Rapat evaluasi selanjutnya dilanjutkan dengan himbauan dari Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

- Untuk akreditasi penilaian selain yang disebutkan oleh Bapak KPN, yang dinilai adalah kekompakan dan antusias untuk perubahan. Seperti di PN Kediri yang telah saya dan tim nilai akreditasinya. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan saya lihat begitu kompak.
- Saya sangat berharap kita untuk berusaha bersama-sama untuk berubah menjadi lebih baik.
- Gedung Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mungkin dapat menjadi penghambat untuk mendapatkan nilai excellent. Namun komponen yang lainnya dapat kita tingkatkan melalui tata organisasi.
- *Selama ini saya sudah melakukan inventarisasi kelemahan, yang kedepannya dapat digunakan untuk perbaikan kita untuk mencapai akreditasi. Secara kasat mata sudah banyak yang sudah kita lakukan, namun masih banyak yang harus dibenahi. Harus ada orang yang konsen terhadap akreditasi. Hakim-hakim di PN Jakarta Selatan rata-rata merupakan mantan-mantan komandan di daerah. Sehingga PN Jakarta Selatan mempunyai potensi untuk diakreditasi.*
- Akreditasi sebenarnya tidak terlalu sulit, berdasar dari aktivitas di Pengadilan menjadi penilaian ICPE yang dilakukan oleh Dirjen Badilum selain berdasar pada ISO dan juga pengawasan Bawas, Zona Integritas, WBBM dan WBBK.
- Maklumat pelayanan harus segera dibuat.
- Pada bulan Oktober BPK akan kembali berkunjung dan akan melakukan pengecekan SIPP, regulasi, pelaksanaan pelayanan dan monev. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri agar hasilnya memuaskan.

Tanggapan dari KPN:

- Sekilas proses akreditasi yang dipaparkan oleh Pak Sekretaris, mulai saat ini kita harus berbenah. Apabila kita sudah siap untuk diakreditasi, akan segera disampaikan kepada Pak Dirjen.

Rapat evaluasi dilanjutkan dengan himbauan dari Wakil Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan:

- Untuk semua Jurusita dan Jurusita Pengganti, relaas panggilan sidang, apabila tidak bertemu dengan orangnya, apabila diserahkan ke Kelurahan dan tidak ada capnya dan langsung diserahkan ke PP, tidak sah panggilannya tersebut.
- Pada saat ini ada kurang lebih 5000 surat bantuan delegasi, sudah dijalankan oleh JS ataupun JSP, namun malas untuk dilaporkan ke PN peminta bantuan delegasi.
- Saya sudah memegang data JSP yang belum menjalankan delegasi.
- Untuk pengisian data Delegasi dalam SIPP pada rapat sebelumnya disepakati yang akan mengisi adalah bagian IT, sehingga surat pengantar yang telah Wapan tanda tangani harus diserahkan 1 (satu) kebagian IT untuk diinput ke dalam SIPP. Apabila tidak dilaksanakan maka akan banyak tunggakan delegasi padahal sudah dikerjakan.

- Ada beberapa JSP yang tidak diberikan pekerjaan, karena banyak pekerjaan yang lama yang belum diselesaikan.
- Banyak PP yang perkaranya sudah selesai namun belum diminutasi.
- Ekstra vonis akan ditayangkan lagi, untuk memacu kinerja kita semua terutama PP dan Hakim.

Tanggapan KPN :

1. JSP yang merasa disebut jangan sampai menyia-nyiakan kesempatan. Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan tidak ada perubahan, lapor ke KPN.
2. Jangan sampai ada lagi tunggakan delegasi yang dilaporkan pada KPT.
3. Rapat bulanan pada hari ini tidak ada pembahasan mengenai tunggakan minutasi. Bulan depan akan dibahas kembali. Harus bersiap-siap, terutama yang mempunyai janji untuk menyelesaikan tunggakan minutasinya.
4. Akan dilakukan survey role model untuk menggantikan role model yang sudah lama.

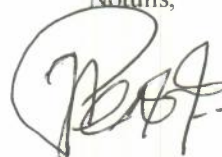
Kemudian Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menutup rapat pada hari ini dengan ucapan terima kasih kepada seluruh peserta rapat.

Sekretaris Rapat,



H. Ahmad Hakir, S.H., M.H.

Notulis,



Astrid Hastridian, SH., MH

Mengetahui,

Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan

Pimpinan Rapat



Prima Haryadi, SH., MH

KAPAT SULAWARAN
JANUARI 2017

